

Rekam Jejak #PahlawanGambut

Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Indonesia



Selayang Pandang

Indonesia memiliki lahan gambut yang luas dengan potensi penyimpanan karbon tinggi, namun rentan terhadap degradasi akibat kebakaran dan alih fungsi lahan. Menjawab tantangan ini, Peat-IMPACTS mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung pelaksanaan *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang dilaksanakan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Peat-IMPACTS yang dijalankan oleh ICRAF Indonesia bekerja sama dengan BPSI Tanah dan Pupuk-Kementerian Pertanian serta didukung oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi nasional (BRIN). Peat-IMPACTS memfasilitasi kolaborasi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pendekatan berbasis lanskap. Kegiatan utama Peat-IMPACTS meliputi penggalian data dan informasi pengelolaan lahan gambut dengan melibatkan Peneliti Mudah Gambut (PMG), penyusunan Peta Jalan Desa Gambut Lestari (PEGARI), penguatan kebijakan dan perencanaan ekosistem gambut, peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan gambut melalui pelatihan, pengembangan model usaha tani, pembentukan kelembagaan di tingkat desa, inisiasi pendanaan inovatif untuk pengelolaan gambut, serta pelibatan generasi muda dalam pengelolaan gambut melalui muatan lokal (mulok) mengenai gambut, dan membangun *platform* WikiGambut untuk berbagi informasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat.

Peat-IMPACTS telah berkontribusi dalam peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal, terciptanya model pengelolaan yang dapat direplikasi, dan terlaksananya kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan gambut. Peat-IMPACTS juga berhasil menghasilkan data dan alat bantu yang mendukung perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Rekomendasi utama dari Peat-IMPACTS adalah memperluas adopsi PEGARI dalam perencanaan desa dan mendukung kebijakan perlindungan gambut yang terintegrasi di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, komitmen yang dituangkan dalam rencana pengelolaan gambut perlu diimplementasikan pada tingkat lapangan, pengembangan skema pembiayaan inovatif perlu terus didorong untuk mendukung keberlanjutan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia. Gerakan #PahlawanGambut melalui pendidikan usia dini, dan pengembangan *platform* pengetahuan sangat menjanjikan untuk pengelolaan gambut berkelanjutan.

A. Latar Belakang

Indonesia, rumah bagi hamparan lahan gambut tropis terluas di dunia, menyimpan potensi luar biasa sekaligus tantangan besar. Lahan gambut, dengan kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah masif, berperan vital dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, pengelolaan yang tidak berkelanjutan, termasuk konversi lahan dan kebakaran berulang, telah mengubah lahan gambut menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Kebakaran lahan gambut, yang kerap terjadi di musim kemarau, tak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Kabut asap tebal yang dihasilkan mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu transportasi, dan menimbulkan masalah pernapasan bagi jutaan orang.

Peat-IMPACTS Indonesia hadir melalui gerakan #PahlawanGambut sebagai upaya konkret untuk mengatasi permasalahan kompleks ini. Dengan menggabungkan pendekatan teknis dan kelembagaan, proyek ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi lintas sektor, Peat-IMPACTS Indonesia

berupaya mewujudkan transformasi lanskap gambut, dari sumber emisi menjadi benteng pertahanan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lahan gambut.

Sejak tahun 2020, ICRAF Indonesia juga telah melakukan kegiatan riset aksi di Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir/OKI dan Banyuasin) dan Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya). Peat-IMPACTS bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target NDC, dengan mengurangi emisi dari kebakaran dan pengeringan lahan gambut melalui tata kelola lanskap gambut yang baik, peningkatan kapasitas petani gambut untuk menghasilkan rantai pasokan yang berkelanjutan, tata kelola iklim yang adil dan efektif melalui mekanisme investasi bersama dan ketersediaan pengetahuan mengenai restorasi gambut dan praktik pengelolaan yang mencakup pilihan-pilihan berdasarkan konteks.

Menuju berakhirnya kegiatan Peat-IMPACTS pada bulan Desember 2024 dirasa penting untuk menampilkan rekam jejak aktivitas kami sepanjang 2020 – 2024 dalam tajuk #PahlawanGambut-Menuju Masa Depan: *Rekam Jejak Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Indonesia melalui Peat-IMPACTS*. Kegiatan ini sekaligus sebagai media undur diri aktivitas lapangan dan pertanggungjawaban serta mendapatkan masukan mulai dari masyarakat tingkat tapak/desa sebagai bentuk sambung rasa guna memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan.

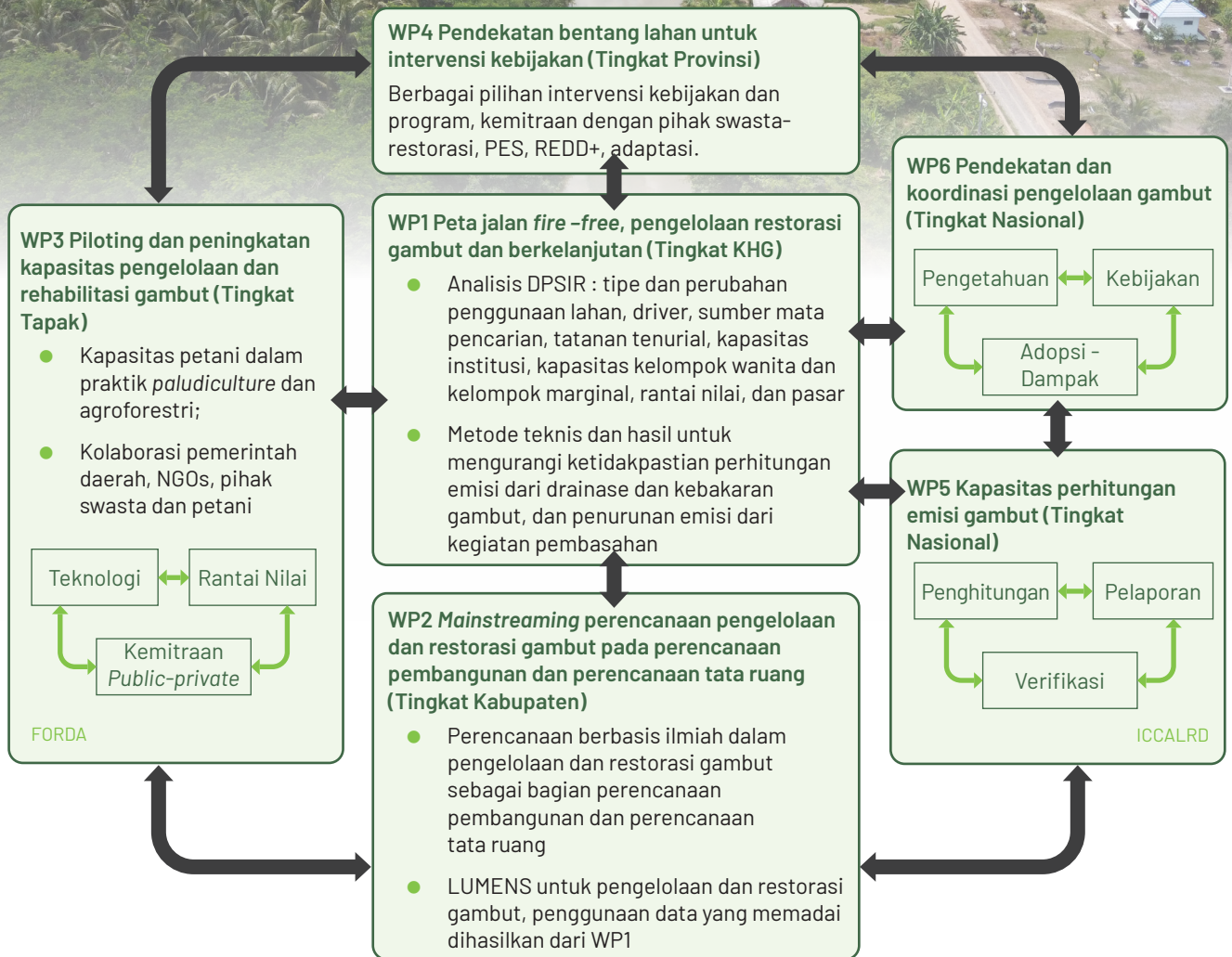
Kemitraan yang dibangun dalam proyek Peat-IMPACTS melibatkan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dukungan dari pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, sangat penting dalam memastikan keberhasilan inisiatif ini, yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem gambut secara berkelanjutan. Kolaborasi ini memperkuat upaya pengelolaan gambut yang inklusif dan mendukung kebijakan lokal yang relevan untuk mencapai tujuan pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan.

B. Tujuan

Peat-IMPACTS Indonesia hadir dengan tujuan utama berkontribusi dalam peningkatan Tata Kelola Lahan Gambut dan Kapasitas Para pihak di Indonesia. Secara spesifik tujuan Peat-IMPACTS adalah menuju pengelolaan dan restorasi gambut secara berkelanjutan pada KHG Saleh-Sugihan dan Sugihan-Sungai Lumpur (Kab. Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan) dan KHG Sungai Kapuas-Sungai Ambawang dan KHG Sungai Terentang-Sungai Kapuas (Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat) secara efektif dan terlaksana secara kolaboratif pada tingkat tapak dan bersinergi dengan *low carbon development/green growth planning* pada tingkat yurisdiksi, dan dapat di-scale-up ke tingkat nasional.

Melalui pendekatan lanskap transformatif yang memadukan peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan, proyek ini diharapkan mendukung Indonesia dapat mencapai target *Nationally Determined Contribution (NDC)*, penurunan emisi dari kebakaran dan drainase dalam pengelolaan dan restorasi gambut berkelanjutan melalui:

- 1 Pengelolaan bentang lahan gambut secara berkelanjutan dalam konteks administrasi yang lebih luas termasuk implementasi rencana pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih baik;
- 2 Peningkatan kapasitas petani di lahan gambut untuk menghasilkan *supply chains* berkelanjutan dan kemitraan yang kuat di antara petani dan para pihak swasta;
- 3 Tata kelola iklim yang *fair and effective* melalui mekanisme ko-investasi;
- 4 Tersedianya pengetahuan pada restorasi gambut berkelanjutan dan praktik pengelolaan melalui berbagai opsi sesuai dengan konteks daerah.



Gambar 1. Ruang lingkup Proyek Peat-IMPACTS Indonesia

Proyek Peat-IMPACTS merupakan proyek hibah yang didanai oleh BMU-IKI Pemerintah Jerman yang dijalankan mulai tahun 2020 hingga 2024. ICRAF Indonesia bersama dengan Mitra Pelaksana yaitu Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk-BPSI-Tanah dan Pupuk Kementerian Pertanian (<https://tanahpupuk.bsip.pertanian.go.id/>) dipercaya untuk menjalankan proyek ini dengan mengambil dua provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, dan tiga kabupaten yang meliputi Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Kubu Raya. Dalam menjalankan Proyek ini Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga terlibat secara intensif terkait dengan peningkatan kapasitas dalam penghitungan emisi lahan gambut secara realistis, termasuk dari kebakaran, dalam mendukung pemerintah Indonesia terkait REDD+, NDC, penghitungan GRK nasional.

C. Strategi

Peat-IMPACTS Indonesia menerapkan strategi implementasi yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai tujuannya. Strategi ini mencakup beberapa pendekatan utama:



- **Pendekatan Lanskap.** Pendekatan lanskap yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai fungsi lahan gambut, seperti produksi, perlindungan, dan konservasi. Upaya pengelolaan lahan gambut diintegrasikan ke dalam tata kelola bentang lahan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara berbagai kepentingan.



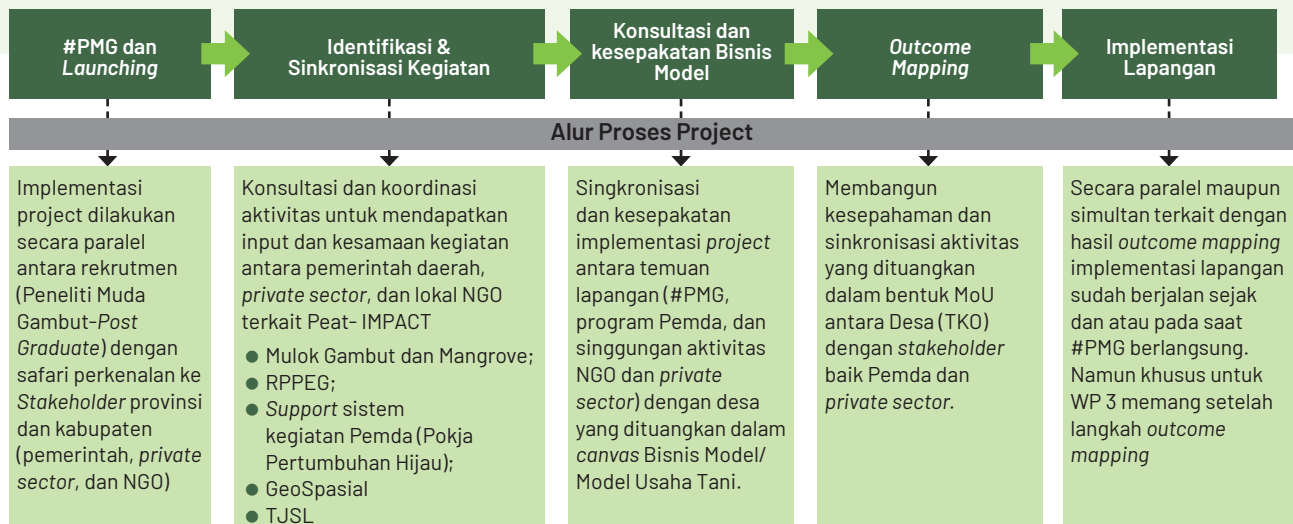
- **Penguatan Kapasitas.** Memberikan pelatihan, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.



- **Pengembangan Model Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan.** Mengembangkan model pengelolaan lahan gambut yang efektif, efisien, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Model ini mempertimbangkan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lahan gambut.



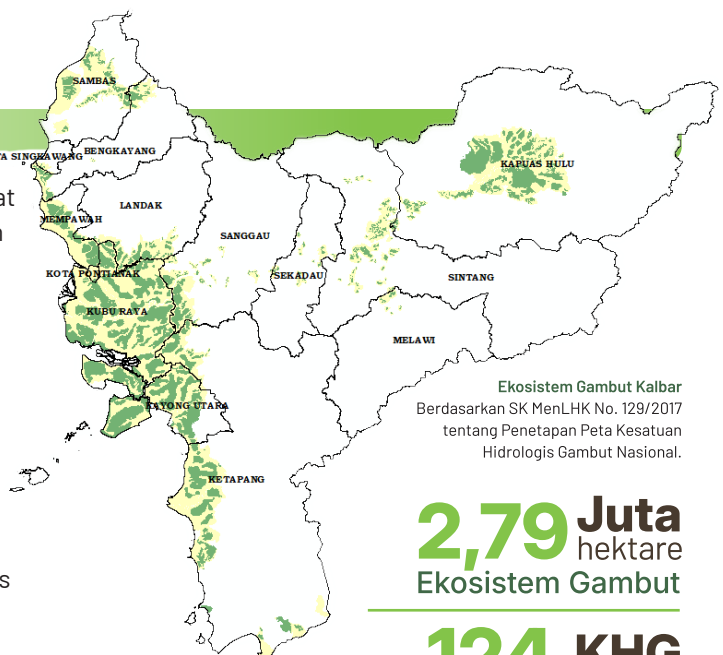
- **Kolaborasi Lintas Sektor.** #PahlawanGambut memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lahan gambut.



Gambar 2. Tahapan Umum Pelaksanaan Proyek

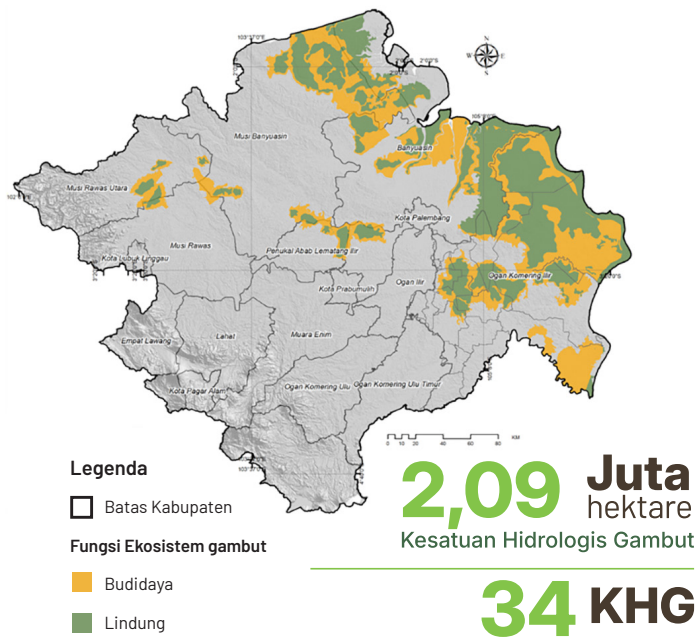
D. Membangun Fondasi

Lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat merupakan ekosistem penting yang memegang peranan penting dalam penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Lahan gambut Sumatera Selatan seluas 2,09 juta hektar dengan 36 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), sedangkan di Kalimantan Barat luasnya mencapai 2,79 juta hektar dengan 124 KHG. Peat-IMPACTS memilih KHG terluas, yaitu Sungai Saleh-Sungai Sugihan di Kabupaten OKI dan Sungai Sugihan-Sungai Lumpur di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Sungai Kapuas-Sungai Ambawang dan Sungai Terentang-Sungai Kapuas di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.



2,79 Juta hektare
Ekosistem Gambut

124 KHG



Gambar 3. Luasan Lahan Gambut

Kedua provinsi ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan gambut secara lestari, namun demikian tantangan dan berbagai dinamika terjadi sangat cepat, seperti halnya di daerah lain yang memiliki lahan gambut yang luas. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi proyek Peat-IMPACTS untuk mengkaji kondisi lahan gambut bekerja sama dengan pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan yang ada. Implementasi Peat-IMPACTS diawali pada puncak pandemi COVID-19 di mana kondisi tersebut menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan mobilitas membuat pengumpulan informasi awal tentang lokasi, masyarakat, ekosistem gambut, dan akses penghidupan menjadi sulit.

Untuk mengatasi masalah ini, Peat-IMPACTS menjalankan program Inkubasi Peneliti Muda Gambut (IPMG). Program ini melibatkan 60 peneliti muda, terdiri dari 30 perempuan dan 30 laki-laki, untuk mengumpulkan informasi awal tentang kondisi ekosistem gambut di setiap provinsi. Meskipun ada keterbatasan mobilitas selama pandemi, program IPMG berhasil mengumpulkan dan menghasilkan data/informasi terkait tata kelola gambut, baik dari aspek kebijakan, perlakuan dan pemahaman masyarakat, potensi serta komoditas potensial yang ditemukan di lapangan. Program ini juga memperkenalkan pendekatan berbasis penelitian kepada para peneliti muda yang diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik di masa depan yaitu *Assessment of Livelihoods and Landscapes to Increase Resilience* (ALLIR) untuk melakukan penggalan data dan kerangka analisis yang memadai. Bagian akhir dari proses ini adalah menghasilkan Peta Jalan Desa Gambut Lestari (PEGARI) di wilayah yang masuk dalam KHG.

Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan informasi dari PEGARI untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait temuan lapangan untuk dirumuskan ke dalam model usaha tani. Proses ini mencakup identifikasi dan kesepakatan terkait komoditas yang potensial, rencana peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, serta penetapan para pihak yang akan dan berpotensi menjadi mitra dalam implementasi program. Selain itu, dengan terpilihnya 6 desa intervensi program Peat-IMPACTS di setiap provinsi, dibentuk Tim Kerja Desa (TKD) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa. Pembentukan TKD sepenuhnya berada di bawah kewenangan desa, baik melalui kepala desa maupun masyarakat setempat, termasuk kelompok tani dan perorangan.

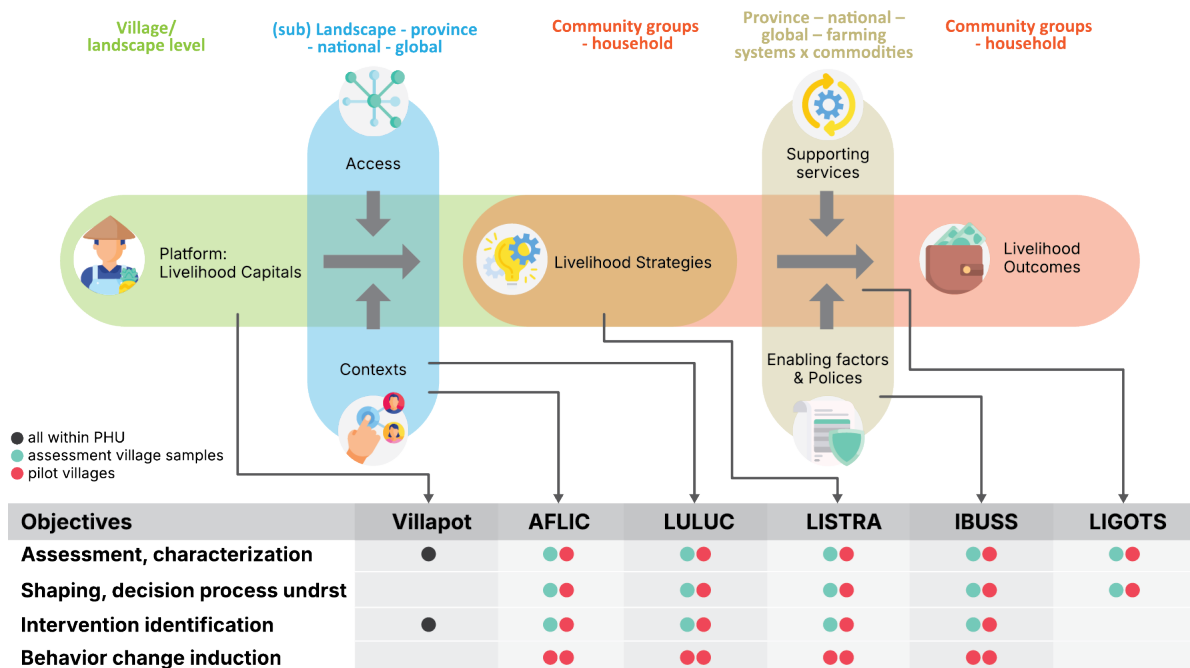
Berdasarkan hasil penyusunan model usaha tani di tingkat desa maka dilakukan *outcome mapping* dengan melibatkan para pemangku kepentingan. *Outcome mapping* ditujukan sebagai upaya membangun visi bersama, rencana implementasi/kegiatan, serta pembentukan kesepakatan kerja sama antara para pihak. *Outcome mapping* menghasilkan kesepakatan baik yang berbentuk MoU maupun komitmen dari sebagian besar para pihak yang terlibat, baik instansi pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi), *private sector*, lokal NGO, akademisi, maupun perwakilan masyarakat yang lain.

Bersamaan dengan proses pada tingkat desa, berbagai upaya untuk membangun kapasitas di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga dijalankan. Di tingkat nasional dilakukan berbagai kegiatan untuk menggali kontribusi gambut terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat proses pengelolaan gambut berkelanjutan. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengelolaan gambut meliputi aspek kebijakan, perencanaan, dan kelembagaan di tingkat daerah.

E. Implementasi dan Kolaborasi

1. Membangun opsi penghidupan berkelanjutan di ekosistem gambut

Kegiatan ini berfokus pada penggalian dan analisis data lapangan yang menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola lahan gambut tingkat desa, sehingga terbentuk profil desa di kawasan lahan gambut. Penyusunan peta jalan adalah langkah operasional untuk merinci opsi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat KHG. Peta jalan ini akan mencakup profil KHG, strategi, intervensi, kegiatan, pembagian peran, dan opsi pendanaan. Peta jalan KHG ini terintegrasi dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di kabupaten dan provinsi.



Gambar 4. Kerangka Kerja ALLIR

Proses penyusunan peta jalan dimulai dengan analisis data awal dari Peneliti Muda Gambut (PMG). Data tersebut kemudian diolah menggunakan alat bantu ALLIR untuk menghasilkan PEGARI di setiap KHG.

Penyusunan PEGARI dilakukan secara inklusif dan partisipatif, berbasis bukti ilmiah. Di mana PEGARI melalui proses klarifikasi, konfirmasi dan konsultasi dengan para pihak baik pemerintah dan masyarakat desa, pemerintah daerah, instansi terkait (kabupaten dan provinsi), sektor swasta, NGO dan akademisi. Proses penyusunannya juga melibatkan analisis data dasar dari laporan PMG dan studi literatur BRG/BRGM. Data yang dianalisis meliputi hasil wawancara, data kependudukan desa, kecamatan, dan kabupaten, serta analisis biofisik keberadaan gambut dan sampel lapangan, serta data tutupan lahan seperti kebun, rawa, sungai, dan kepemilikan lahan.



Gambar 5. Dokumen Peta Jalan Gambut Lestari (Pegari)

2 Merencanakan pengelolaan gambut berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan dan restorasi gambut ke dalam rencana pembangunan daerah, dengan fokus pada pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di sektor berbasis lahan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Melalui diskusi dan kesepakatan, dibentuklah kelompok kerja (POKJA) yang akan mengawal proses pengelolaan gambut, salah satunya dengan penyusunan Dokumen RPPEG sebagai panduan upaya pengelolaan berkelanjutan terhadap ekosistem gambut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Proses penyusunan dokumen penyusunan RPPEG dikerjakan secara kolaboratif dan dilaksanakan melalui POKJA yang sudah dibentuk. POKJA tersebut melibatkan berbagai Badan/OPD terkait, UPT Kementerian, TRGD/TRGMD, akademisi, NGO/LSM, dan praktisi lainnya.

Peat-IMPACTS berkontribusi dalam memfasilitasi proses penyusunan, dan mengembangkan kerangka analisis khususnya simulasi perhitungan dampak terhadap skenario RPPEG. Informasi ini penting dalam rangka untuk memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan dalam implementasi RPPEG di masa yang akan datang. RPPEG difokuskan untuk mendukung tata kelola gambut berkelanjutan melalui

perencanaan pengelolaan dan restorasi gambut, serta pengarusutamaan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di Provinsi Sumatera Selatan muatan RPPEG telah dipertimbangkan dalam penyusunan RTRW, sehingga di masa yang akan datang diharapkan layer kawasan gambut akan mendapat perhatian dalam konteks kelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kubu Raya, aspek pengelolaan dan perlindungan gambut juga sudah dipertimbangkan dalam penyusunan program dan kegiatan di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

3 Membangun desa percontohan pengelolaan pertanian ramah gambut

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam paludikultur dan agroforestri guna memperbaiki mata pencaharian, serta mengembangkan dan menerapkan praktik baik dalam pengelolaan lahan gambut melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat/petani. Dua belas (12) desa percontohan terpilih berdasarkan karakteristik dan potensi spesifik yang ada di tingkat KHG. Dari proses ini diharapkan nantinya potensi replikasi dan adopsi dapat dilakukan pada setiap desa dengan kesamaan karakteristik dari 12 desa tersebut. Model usaha tani diimplementasikan sesuai dengan lima modal penghidupan (sumber daya alam, manusia, sosial, finansial dan fisik) berdasarkan data yang telah dikumpulkan para peneliti muda gambut untuk selanjutnya didiskusikan bersama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga petani di masing-masing desa.

Pembentukan tim kerja di tingkat tapak pada tahap awal dilakukan secara partisipatif bersama dengan perangkat desa serta seluruh masyarakat. Tim kerja desa berperan sebagai implementor di tingkat tapak. Pembentukan tim kerja desa dilakukan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan diketahui oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Teknis yang mengampu di tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten. Model usahatani yang telah disusun secara bersama-sama selanjutnya didiskusikan dengan OPD teknis terkait dan mitra pembangunan bersama tim kerja desa yang telah dibentuk, pembentukan tim kerja desa disepakati bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala desa dan diketahui oleh DPMD kabupaten.

Berbagai pengelolaan usaha berbasis pengelolaan gambut lestari dilaksanakan bersama-sama menyesuaikan dengan model usaha tani yang telah disepakati, dengan dimulai dari melakukan pembagian peran, peningkatan kapasitas pengelolaan lahan, penguatan kelembagaan, dan berbagai kegiatan langsung di lapangan. Sebagai media praktik langsung di tingkat lapangan dibangun juga beberapa *demonstration plot* yang menggambarkan masing-masing model usaha taninya. Berbagai kegiatan hilir yang meliputi pengembangan pasca panen, pengemasan, dan menjalin pasar juga dibangun sembari dihasilkannya produk dari masing-masing kegiatan, sehingga diharapkan hubungan hulu-hilir akan dapat terjadi dan memastikan keberlangsungan usaha di tingkat masyarakat. Secara ringkas potret kegiatan di dua belas (12) desa disajikan pada tabel berikut.

	Model Usaha Tani	Mitra Kunci
Sumatera Selatan (KHG Saleh – Sugihan; KHG Sugihan – Lumpur)		
Desa Jadi Mulya	Pengembangan agroforestri dengan tanaman palatabilitas rendah bagi gajah	Tim Kerja Desa, Tim Patroli Gajah, Pokja Koridor Gajah Sumatra Sugihan Simpang Heran, BKSDA Sumsel, BPDAS Sumsel
Desa Nusakarta	Pengembangan agroforestri kelapa sawit	Tim Kerja Desa, Kelompok perempuan/PKK
Desa Rengas Abang	Pengembangan usaha pupuk organik berbahan baku tandan kosong kelapa sawit (TKKS)	Koperasi Plasma, PT. SAML, DPMD OKI, Dinas Perkebunan dan Peternakan OKI
Desa Baru	<i>Agrosilvofishery</i> & Budidaya Lebah Kelulut	Kelompok Tani Hutan Bunga Desa, Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, KPH Palembang – Banyuasin, DPMD Banyuasin, APIDA, Universitas Sriwijaya, BPDAS Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin, PHRI
Desa Penangoan Duren	Pengembangan agroforestri karet dengan tanaman buah-buahan	Tim Kerja Desa, Kelompok Perempuan/PKK
Desa Lebung Itam	Pengembangan kebun induk dan pembibitan karet dan pohon buah-buahan	Tim Kerja Desa, DPMD OKI

	Model Usaha Tani	Mitra Kunci
Kalimantan Barat (KHG Sungai Kapuas–Sungai Ambawang dan Sungai Terentang–Sungai Kapuas)		
Desa Pasak	Pengembangan agroforestri karet - kopi	Tim Kerja Desa (TKD), PT Bintang Borneo Persada, 101 Coffee
Desa Bengkarek	Pengembangan komoditas kopi dan karet	Tim Kerja Desa (TKD), PT Bintang Borneo Persada, 101 Coffee, BPDAS Kalbar
Desa Sungai Asam	Pengembangan agroforestri matoa, durian, dan nanas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya, BPDAS Kalbar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, PKK Kabupaten Kubu Raya
Desa Permata	Peningkatan kapasitas LPHD dalam pengembangan agroforestri kopi di Hutan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan 101 Coffee
Desa Radak Dua	Pengembangan <i>agrosilvofishery</i>	Bappedalitbangda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perikanan, PT. WSL, PT. Panah Merah, SMK Pertanian, Universitas Nahdhatul Ulama
Desa Kubu	Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Kelola Wilayah Perairan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan, Bappedalitbangda Kabupaten Kubu Raya, PT. Kandalia Alam, PT. EKL, dan Yayasan Blue Forest

4 Merancang Pembiayaan Inovatif Untuk Pengelolaan Ekosistem Gambut

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi skema pembiayaan tata kelola gambut yang ramah lingkungan dan lestari. Kegiatan ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan NGO lokal untuk mengidentifikasi model-model alternatif pembiayaan guna mendukung pelaksanaan perlindungan ekosistem gambut berkelanjutan. Alternatif pembiayaan yang teridentifikasi meliputi (1) transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE), (2) *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), (3) dana hibah melalui pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), dan (4) kemitraan dengan pihak swasta.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sehingga diperoleh beberapa dukungan kebijakan dan langkah operasional terkait pendanaan inovatif untuk mendukung pengelolaan gambut berkelanjutan.

5 Penguatan data dan informasi untuk pengukuran emisi gambut

Kegiatan berkontribusi dalam membangun kapasitas nasional dalam penghitungan emisi dari lahan gambut. Bagian dari proyek yang diselenggarakan oleh BPSI Tanah dan Pupuk serta Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah mengevaluasi emisi CO₂ dari beberapa tipe tutupan lahan yang bertujuan untuk menghasilkan faktor emisi baru. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas dalam perhitungan emisi lahan gambut. Capaian kunci paket kerja ini adalah

Provinsi	Kegiatan
Sumatera Selatan	Identifikasi model-model alternatif pembiayaan dan kemitraan guna mendukung pelaksanaan perlindungan ekosistem gambut berkelanjutan
	Kajian palatabilitas rendah serangan gajah dan permodelan pasar untuk sumber mata pencarian alternatif di Desa Jadi Mulya
	Rekomendasi kemitraan untuk lokasi konservasi gajah guna mencegah konflik antara gajah dan masyarakat di tiga desa di Simpang Heran, Pokja Sugihan – Simpang Heran, merupakan bentuk kemitraan yang nyata antara Pemerintah (Provinsi + kabupaten) bersama dengan para pihak dan masyarakat, yang dilegalkan dalam bentuk SK Pokja yang ditanda-tangani oleh Bupati kabupaten OKI.
	Rancangan SK Bupati Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten OKI untuk mendukung kegiatan khususnya di lahan gambut
Kalimantan Barat	Identifikasi potensi skema pembiayaan tata kelola gambut yang ramah lingkungan dan lestari
	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum TJSL Perusahaan Kabupaten Kubu Raya



Gambar 6. Pengukuran subsiden dan pengambilan contoh gambut di lapangan



Gambar 7. Peserta Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Lahan Gambut

diperolehnya data dan pengetahuan baru berdasarkan pengamatan lapangan terkait perhitungan emisi dari pengelolaan lahan gambut, dan perhitungan penurunan emisi dari kegiatan restorasi/pemulihan lahan gambut. Untuk melakukan kegiatan ini telah dilakukan pemasangan alat untuk pemantauan lapangan berupa *closed chamber* untuk mengukur fluks CO₂, piezometer untuk mengukur muka air tanah dan subsiden poles sejak tahun 2022.

Kontribusi lain yang diberikan adalah berupa panduan inventarisasi emisi gas rumah kaca dari dekomposisi dan kebakaran gambut. Berbagai brosur informasi praktis mengenai gambut dan pengelolaan gambut secara berkelanjutan telah dihasilkan. Diseminasi dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar nasional dan internasional juga telah dilaksanakan. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan inventarisasi GRK dan pengelolaan gambut berkelanjutan telah diselenggarakan, berbagai diskusi kelompok terfokus mengenai cara pengelolaan lahan gambut yang lebih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Beberapa publikasi ilmiah akan dihasilkan dari kegiatan ini.

6 Membangun Pengelolaan Pengetahuan Untuk Ekosistem Gambut

Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan pendekatan dan koordinasi dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Capaian kunci kegiatan ini adalah Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Gambut untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan platform pengelola pengetahuan gambut yang diberi nama WikiGambut. Mulok Gambut merupakan muatan lokal pertama di Indonesia yang secara khusus membahas tentang ekosistem gambut. Proses pengembangan muatan lokal ini berlangsung dalam rentang waktu 2022-2023, di mana Peat-IMPACTS bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin, Ogan Komering Ilir dan Kubu Raya bersama BRG/BRGM, Forum DAS Sumatera Selatan dan beberapa mitra pembangunan yang bekerja di setiap provinsi dan kabupaten, para ahli, dan akademisi dari perguruan tinggi.



Gambar 8. Peluncuran kurikulum muatan lokal gambut



Gambar 9. Kegiatan Bincang Gambut, Edukasi WikiGambut, dan bedah artikel

WikiGambut (<https://wikigambut.id>) adalah platform pengelola pengetahuan tentang gambut yang dikelola oleh komunitas para pihak yang dibentuk secara sukarela dan peduli terhadap permasalahan lahan gambut, yang terdiri dari berbagai profesi dari berbagai daerah. WikiGambut berisi berbagai tulisan yang bersifat opini, fitur dan cerita pengalaman pengetahuan gambut, dalam bentuk laman website WikiGambut. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 700 artikel yang ditulis secara gotong royong oleh komunitas. WikiGambut diharapkan memotret secara lengkap dari berbagai sisi terkait pengelolaan gambut, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam pengelolaan gambut.

F. Penutup dan Beberapa Catatan

Program Peat-IMPACTS Indonesia sudah berlangsung hampir lima tahun di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kubu Raya, serta Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Kubu Raya. Tentu saja masih banyak kegiatan dan kolaborasi bersama berbagai pihak yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

ICRAF Indonesia bersama BPSI Tanah dan Pupuk, dan semua mitra sebagai pelaksana Peat-IMPACTS Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Kubu Raya serta para pemangku kepentingan, hingga masyarakat secara keseluruhan, yang telah menjalin kerja sama dengan baik selama proyek berjalan. Sebagai lembaga penelitian yang melakukan kegiatan penelitian aksi, semua hasil disesuaikan dengan cara kerja dan kebutuhan di tingkat lapangan. Produk akhir dari kegiatan proyek adalah sistem atau model yang merupakan hasil pembelajaran dari implementasi program, yang bertujuan membangun dan meningkatkan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan dan kerangka kerja dan implementasi di tingkat lapangan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati dengan para pemangku yang relevan dari proses awal perencanaan proyek ini.

Beberapa hal terkait yang perlu dicatat sebagai upaya untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dituangkan di beberapa butir di bawah ini.

- 1 Dokumen PEGARI telah disusun melalui pendekatan inklusif dan partisipatif, mencakup 39 desa yang berada di KHG Sungai Saleh – Sungai Sugihan dan Sungai Sugihan – Sungai Lumpur, serta 27 desa yang berada di KHG Sungai Kapuas-Sungai Ambawang dan Sungai Terentang – Sungai Kapuas. PEGARI dapat menjadi referensi penting dalam perencanaan di tingkat desa, khususnya dalam upaya perlindungan ekosistem gambut berkelanjutan.
- 2 Alat bantu permodelan ALLIR dalam penyusunan dokumen PEGARI akan sangat bermanfaat jika bisa diajarkan dan digunakan oleh perangkat pemerintahan, baik yang ada di provinsi sampai dengan perangkat di tingkat kabupaten.
- 3 Diperlukan kelanjutan berbagai upaya pengarusutamaan muatan RPPEG (Provinsi dan Kabupaten) ke dalam: (1) proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, (2) kebijakan tata kelola SDA di provinsi dan kabupaten, mengingat luasnya area gambut terhadap area wilayah, dan (3) rencana kelola/usaha berbagai pemangku kepentingan terkait dalam penggunaan lahan di provinsi dan kabupaten.
- 4 Dalam rangka mewujudkan ekosistem gambut yang lestari, dibutuhkan intervensi yang konsisten didukung dengan sumber pendanaan yang memadai. Skema pendanaan inovatif yang berhasil diidentifikasi selama ini, diharapkan dapat terus mendorong keberlanjutan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat tapak. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Teknis terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peranan yang penting untuk memastikan segala prosesnya terintegrasi dengan baik dalam proses perencanaan daerah.
- 5 Data dan pengetahuan berdasarkan pengamatan lapangan terkait perhitungan emisi dari pengelolaan lahan gambut, dan perhitungan penurunan emisi dari kegiatan restorasi/pemulihan lahan gambut diharapkan akan menjadi bahan yang melengkapi upaya di tingkat nasional dalam pencapaian NDC, sehingga diskusi dan berbagai forum *sharing* dengan berbagai pihak agar terus dapat dilanjutkan.
- 6 Pada tahapan berikutnya, kurikulum muatan lokal gambut yang telah diterapkan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten OKI, Banyuwasin, dan



Gambar 10. Penyusunan Dokumen PEGARI



Gambar 11. (a) Kegiatan Penyusunan Dokumen RPPEG Kabupaten Kubu Raya, (b) Dokumen RPPEG Kabupaten Kubu Raya



Gambar 12. Kurikulum muatan lokal gambut yang telah diterapkan pada tingkat sekolah dasar

Kubu Raya diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang memiliki ekosistem gambut. Sementara itu, Wikigambut juga diharapkan dapat konsisten menjadi *platform* berbagi pengetahuan tentang gambut serta semakin berkembang dan inovatif dari segi komunitas maupun media berbagi.

G. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi umum dalam keberlanjutan pengelolaan gambut berdasarkan hasil pembelajaran pelaksanaan kegiatan Peat-IMPACTS, sebagai berikut:

1 Di Tingkat Daerah

Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat/komunitas lokal: Mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata kelola gambut, termasuk penyusunan rencana dan kebijakan daerah yang mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan praktik baik yang berkelanjutan: Memberikan pelatihan dan praktik kepada petani mengenai praktik pengelolaan gambut yang ramah lingkungan, seperti *paludiculture* dan agroforestri, untuk menjaga fungsi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi muatan lokal tentang gambut dalam kurikulum sekolah: Memperluas penerapan muatan lokal terkait ekosistem gambut di

sekolah-sekolah di wilayah lain di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, juga di wilayah gambut lainnya, agar kesadaran lingkungan dapat ditanamkan sejak dini.

Mendorong adopsi teknologi tepat guna, seperti Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pembuatan dan aplikasi pupuk organik, dan beberapa inovasi lainnya dalam pengelolaan gambut: Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam praktik-praktik pengelolaan gambut yang baik, dan *menscalling-up* kegiatan yang sudah dilakukan di tingkat tapak.

2 Di Tingkat Nasional

Pembentukan forum multipihak untuk sinergi pengelolaan gambut: Membentuk forum nasional yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat untuk mengoordinasikan kegiatan pengelolaan gambut, membangun sinergi, serta mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan.

Pemanfaatan *platform* pengetahuan seperti WikiGambut: Memaksimalkan penggunaan WikiGambut sebagai pusat informasi dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan bahan bacaan mengenai gambut di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan gambut: Mendorong penggunaan teknologi untuk memonitor kondisi gambut dan mendukung praktik-praktik pengelolaan gambut yang baik.

Untuk mendapatkan akses ke berbagai hasil dan informasi terbaru terkait pengelolaan lahan gambut, silakan kunjungi portal informasi <https://pahlawangambut.id>. Di portal informasi ini, dapat ditemukan berbagai informasi kegiatan, panduan, cerita dan materi lain yang relevan untuk mendukung pelestarian dan pemulihan ekosistem gambut di Indonesia. Untuk mengakses berbagai produk pengetahuan terkait pengelolaan gambut, silakan kunjungi tautan <https://pahlawangambut.id/bekerja/publikasi>. Publikasi ini dapat diunduh bagi para pembaca, untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan panduan praktis guna mendukung pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.

Sitasi

Susanto D, Hendrawan H, Benita T, Rahayu S, Leimona B, Pandiwijaya A, Mufida A, Karimah Y, Atikah T, Johana F, Ekadinata A. 2024. *Rekam Jejak #PahlawanGambut: Ringkasan Upaya Peningkatan Pengelolaan Lahan Gambut dan Kapasitas Pemangku Kepentingan di Indonesia*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org | www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



Supported by:

Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Nuclear Safety and Consumer Protection



INTERNATIONAL
CLIMATE
INITIATIVE

#PahlawanGambut
pahlawangambut.id

based on a decision of
the German Bundestag